

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Peningkatan peran APIP akan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih akan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih lanjut akan berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan peningkatan peran APIP dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diindikasikan antara lain dengan berkurangnya secara signifikan kasus tindak pidana korupsi termasuk temuan hasil pemeriksaan pengawas internal (APIP) atau hasil pemeriksaan pengawas eksternal (BPK) serta meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai implementator. Dari ketiga aspek yang menjadi kebijakan penguatan APIP, hanya aspek penguatan kelembagaan yang telah dilaksanakan, sedangkan aspek penguatan SDM APIP dan penguatan pemenuhan kecukupan anggaran APIP belum terlaksana sebagaimana mestinya. Implementasi kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang belum berhasil dilaksanakan, sehingga pencegahan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tujuan kebijakan akan sulit juga tercapai. Hal ini juga *linear* tergambar dengan beberapa kasus korupsi yang masih terjadi pada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa faktor menjadi penyebab kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP ini tidak bisa diimplementasikan secara efektif seutuhnya. Komunikasi yang antar implementator yang tidak efektif, sumber daya pada implementator yang tidak mendukung, disposisi atau sikap para aktor kebijakan yang kurang aktif, serta struktur birokrasi yang tidak efisien dan kurang mendukung kebijakan ini terimplementasikan dengan baik, sebagaimana Edward menyebutkan dalam teorinya.

Implementasi kebijakan yang tidak berjalan mulus, berdampak besar terhadap tujuan kebijakan itu sendiri. Tantangan bagi APIP diseluruh Indonesia tidak hanya APIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang, kedepannya akan semakin banyak dan komplek. Kekurangan sumber daya, kekurangan infrastruktur, kekurangan anggaran, dan kesulitan akses informasi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan menjadi tantangan baru bagi APIP. Oleh sebab itu, penguatan APIP menjadi sebuah keniscayaan, agar korupsi di Kota Padang Panjang bisa lenyap dan berkurang secara signifikan. APIP yang kuat akan dapat dengan mudah mencegah tindak pidana korupsi, dan sebaliknya APIP yang lemah akan sangat mudah diakali oleh para koruptor dan ASN yang suka berbuat curang/ *fraud*.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang belum terjadi tren penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan setiap tahunnya. Jika penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan ini kita pakai sebagai salah satu indikator hasil kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP maka, hasil kebijakan ini bisa kita simpulkan sementara belum berhasil. Namun berbeda halnya dengan kasus korupsi di Kota Padang Panjang, berdasarkan data Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, dua tahun terakhir tidak ada kasus korupsi yang dilakukan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum yang sampai dilimpahkan ke tahap penuntutan. Indikator ini bisa juga kita pakai sebagai salah satu ukuran apakah kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP berhasil atau gagal di Kota Padang Panjang. Dua indikator diatas tentu belum cukup untuk menilai apakah kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP ini berhasil atau gagal di Kota Padang Panjang. Menurut peneliti masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, akan tetapi kita dapat menyimpulkan sementara kecenderungan keberhasilan kebijakan ini memang ada di Kota Padang Panjang, jika kita bandingkan dua indikator diatas.

6.2. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, agar kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP bisa diimplementasikan dengan efektif yang pada tujuan akhirnya dapat mencegah tidak pidana korupsi di Kota Padang Panjang disarankan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi yang efektif dan struktur birokrasi yang efisien antara seluruh Perangkat Daerah, sehingga apapun kebijakan yang telah ditetapkan bisa terimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan itu dibuat.
2. Secara konsisten terus melakukan penambahan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ideal.
3. Melalui BKPSDM Kota Padang Panjang, agar setiap APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan lainnya.
4. Melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah, agar Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang diberikan anggaran pengawasan 1 % diluar belanja gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
5. Pemerintah Kota Padang Panjang agar terus melanjutkan kebijakan penguatan peran dan fungsi APIP untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Padang Panjang, karena dengan APIP yang kuat maka korupsi di Kota Padang Panjang dapat dicegah lebih awal.